

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, D. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua*. Jatinangor: IPDN.
- Ibrahim. (2014). Perencanaan Penganggaran Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 98-111.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka .* Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri 90/2019 Perspektif Dalam Sisitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Menteri Dalam Negeri*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur....* Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- KlinikHukum. (2022, Maret 5). *Tata Hierarki Perundang-Undangan*. Retrieved from Klinik Hukum Kalsel Law Office: <https://klinikhukumkalsel.com/tata-hierarki-peraturan-perundang-undangan/>
- Pakasi, J. D. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*. Jatinangor: IPDN.
- Patarai, I. M. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2020). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta*. Kota Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2020). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. Kota Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2022). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. Kota Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2022). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan*

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*. Kota Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2022). *Ringkasan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023*. Kota Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2023, Juli 23). *Gambaran Umum*. Retrieved from www.jogjakota.go.id: <https://www.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>
- Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2023). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023*. Kota Yogyakarta: Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pradana, B. (2021). Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 110-114.
- Rasidi, D. (2011, Agustus 14). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bagian Perencanaan*. Retrieved from Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): <http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsspnn>
- Sihombing, E. N. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 95-104.
- Tesapati, S. (2020). *Perbedaan Bagan Akun Standar Antara Permendagri 60 Tahun 2013 dengan Permendagri 90 Tahun 2019*. Maluku Utara: Ditjen Perbendaharaan Kanwil Maluku Utara.
- Wirartha, I. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Yudanto, A. H. (2023, Juni 14). *Kesiapan Kementerian PPN/BAPPENAS Dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional*. Retrieved from JDIH BAPPENAS: <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>